



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai Penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan dimana setiap tahunnya dijabarkan Rencana Kinerja Tahunan masing-masing program.

Sangat disadari adanya keterbatasan dari Renstra ini, oleh karena itu dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadinya penyempurnaan dan penyesuaian dengan kondisi lingkungan strategis dan potensi sumberdaya pembangunan di Sumatera Selatan.

Palembang, 29 September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Selatan,



Ir. RUZUAN EFENDI, MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 196812101993031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	22
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja	23
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.2.2 Isu Strategis	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
3.1 Tujuan	30
3.2 Sasaran	30
3.3 Strategi.....	33
3.4 Penahapan Pembangunan	33
3.5 Penyajian Lokus.....	35
3.6 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029.....	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
4.1 Uraian Program	37
4.2. Uraian Kegiatan	37
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	39
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;.....	110

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 111

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun
2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 112

BAB V PENUTUP..... 115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan..... 18

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024..... 20

Tabel 2.3 Isu Strategis Perangkat Daerah 26

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 31

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD..... 34

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 35

Tabel 4.1 Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD..... 40

Tabel 4.2 Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan..... 74

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 110

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD..... 111

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD..... 112

table 4.6 Prognosis Pendapatan Pelayanan BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan..... 114

Tabel 4.7 Pendanaan Indikatif 5 Tahun Kedepan BLUD UPTD Laboratorium keswan dan kesmavet..... 114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yakni SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA. Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan Inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, Tangguh, inovasi dan adil. Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan Pembangunan sosial berkelanjutan, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mewujudkan pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang merupakan tindaklanjut dari amanat pasal 277 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi di bidang

perencanaan dan pelaksana pembangunan Ketahanan pangan dan peternakan, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Sumatera Selatan berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi, sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi pembangunan ketahanan pangan dan peternakan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis bidang pembangunan ketahanan pangan dan urusan pertanian sub urusan peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dituntut untuk mampu menjabarkannya ke dalam berbagai bentuk dokumen perencanaan pembangunan bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan yang salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, yang didalamnya terdapat rencana kerja lima tahun ke depan. Selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang memuat visi, misi dan agenda-agenda pembangunan lingkup ketahanan pangan dan peternakan.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kebijakan umum pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja sub sistem ketahanan pangan serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Kebijakan tersebut disusun melalui proses identifikasi isu-isu penting dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi, dilanjutkan dengan perumusan kebijakan untuk menindaklanjuti, mengantisipasi atau mengatasi isu-isu dimaksud. Selanjutnya, kebijakan dikelompokkan dalam kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka menengah.

Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kerawanan pangan transien (mendadak) serta kerawanan kronis. Dalam hal kerawanan transien, kebijakan diarahkan untuk mengatasi situasi yang bersifat darurat sedangkan dalam hal kerawanan kronis, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangannya. Kebijakan jangka panjang diarahkan untuk menjamin terwujudnya ketahanan pangan keluarga.

Peternakan di Sumatera Selatan merupakan sub sektor yang sangat penting dalam rangka mendukung program peningkatan lumbung pangan dan peningkatan nilai gizi masyarakat dalam program Sumatera Selatan Sehat. Kontribusi pembangunan peternakan yang membuka peluang bisnis bagi investor untuk penanaman modal, maka sub sektor peternakan harus ditingkatkan dan lebih baik lagi. Jika dilihat dari demografi penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah penduduk 8.928.515 jiwa dari luas wilayah seluas 86.771,68 Km² (Sumsel Dalam Angka 2025), maka masih sangat memungkinkan untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan dengan membentuk sentra-sentra peternakan di wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Pembangunan peternakan tentunya tidak akan berjalan dengan mengandalkan kemampuan keuangan pemerintah saja tetapi berkat dukungan seluruh rakyat dan swasta (non pemerintah) bergerak secara

sinergis dengan berbagi peran antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat, serta didukung Perguruan Tinggi yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk mencapai tujuan yang sama.

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan berdiri sejak tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
4. Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Lembar 1330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 04 November 2016;
15. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045.
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Desember 2016.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan adalah Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun kedepan yang berhubungan dengan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang ketahanan pangan dan peternakan.

Dalam memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) terbentuklah suatu harmonisasi perencanaan secara terpadu, terfokus dan terprogram dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan peternakan sebagai bahan acuan melaksanakan kebijakan program strategis pembangunan ketahanan

pangan dan peternakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah menyelaraskan pandangan, pemahaman, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan dan peternakan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan skala prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan perencanaan pembangunan daerah umumnya sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang ketahanan pangan dan peternakan serta sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam rangka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
- 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Isu Strategis

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi
- 3.4 Penahapan Pembangunan
- 3.5 Penyajian Lokus
- 3.6 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB. V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan.

Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

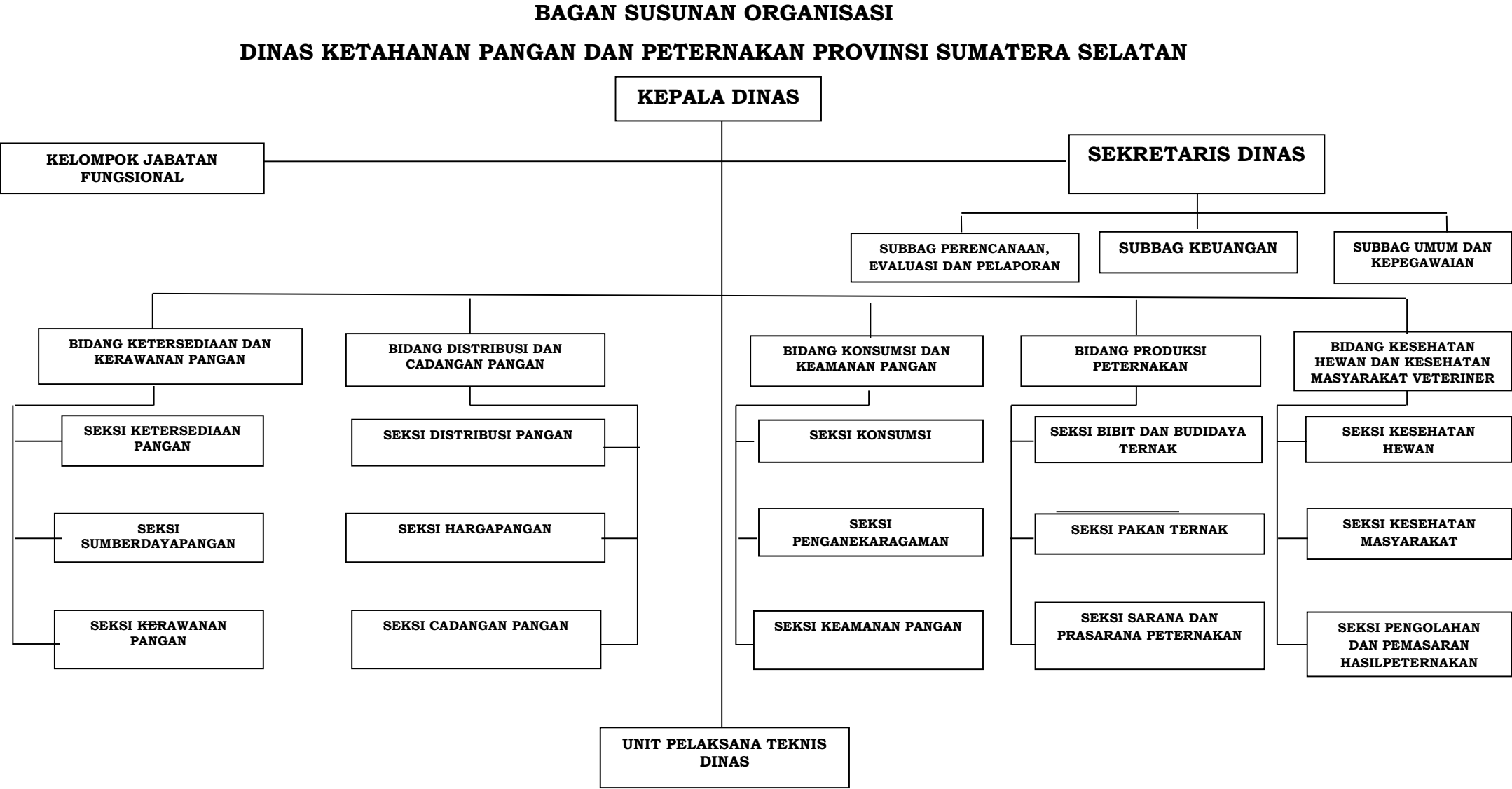
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 69 Tahun 2016, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.
- 4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi :
 - a. Seksi Distribusi Pangan ;
 - b. Seksi Harga Pangan; dan
 - c. Seksi Cadangan Pangan.
- 5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi ;
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Panganekaragaman Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.

6. Bidang Produksi Peternakan membawahi :
 - a. Seksi Bibit dan Budidaya Ternak;
 - b. Seksi Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
7. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional

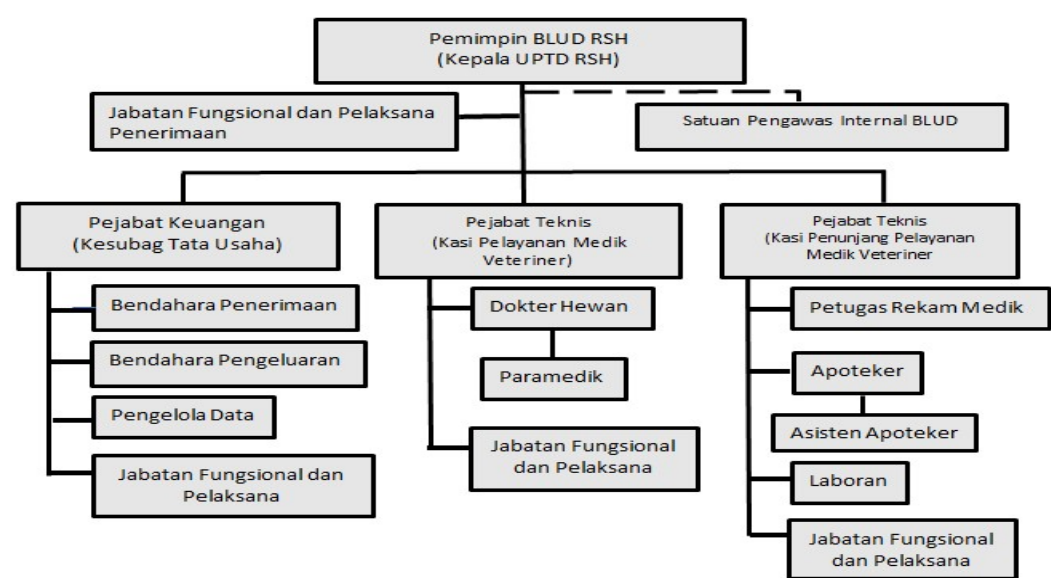
Adapun bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 69 Tahun 2016 dapat dilihat dibawah ini.



Rencana penerapan layanan BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan dan BLUD UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Tugas Pokok BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pasal 2 menjelaskan tentang Pembentukan, kedudukan dan tugas BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas. Adapun bagan struktur organisasi BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan :

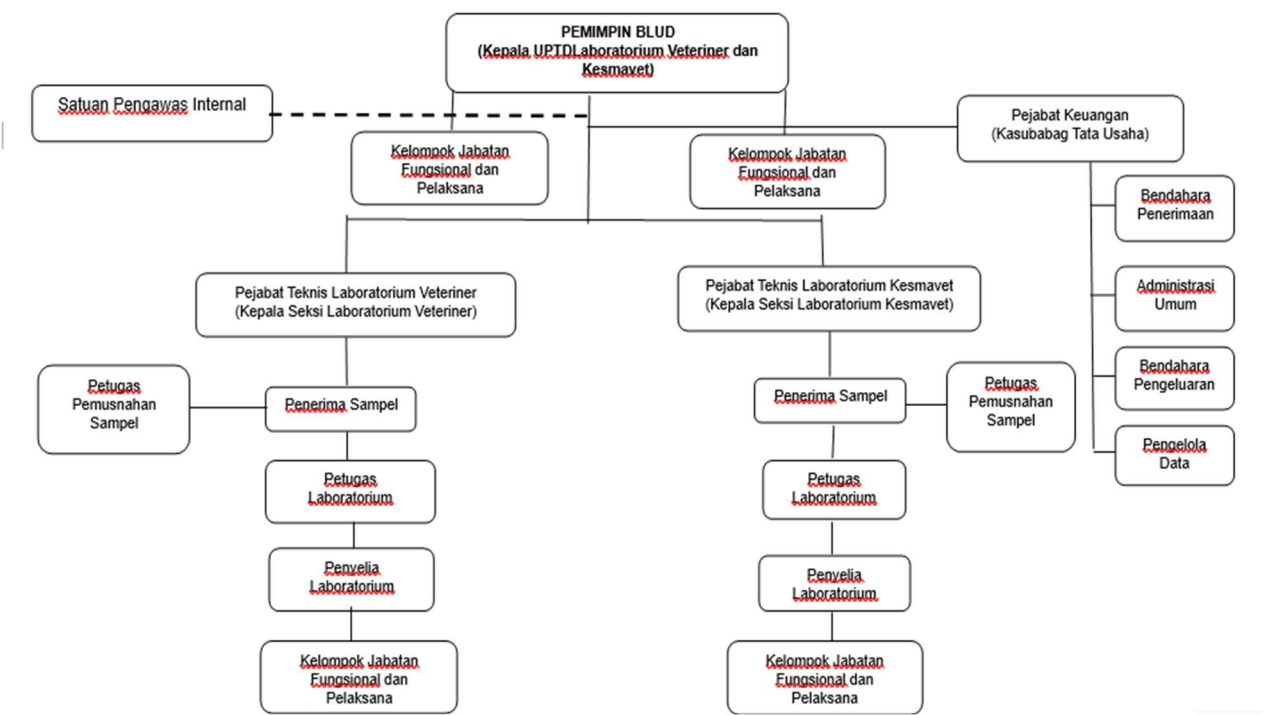
**Struktur Organisasi BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan**



BLUD UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesmavet Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala BLUD UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas serta merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan. BLUD UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesmavet Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan dibidang UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesmavet.

Struktur Organisasi BLUD UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesmavet
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh pegawai sebanyak 184 orang yang terdiri 110 PNS dan 74 Honorer dan TKPD.

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel 2025, berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan.

GOLONGAN	JUMLAH	STATUS PEGAWAI/ JENIS KELAMIN					
		CPNS			PNS		
		PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I/a	0	0	0	0	0	0	0
I/b	0	0	0	0	0	0	0
I/c	0	0	0	0	0	0	0
I/d	1	0	0	0	1	0	1
JUMLAH GOLONGAN I	1	0	0	0	1	0	1
II/a	0	0	0	0	0	0	0
II/b	0	0	0	0	0	0	0
II/c	3	0	0	0	1	2	3
II/d	6	0	0	0	5	1	6
JUMLAH GOLONGAN II	9	0	0	0	6	3	9
III/a	15	3	7	10	2	3	5
III/b	21	1	1	2	7	12	19
III/c	12	0	0	0	5	7	12
III/d	22	0	0	0	6	16	22
JUMLAH GOLONGAN III	70	4	8	12	20	38	58
IV/a	23	0	0	0	9	14	23
IV/b	5	0	0	0	2	3	5
IV/c	8	0	0	0	2	6	8

GOLONGAN	JUMLAH	STATUS PEGAWAI/ JENIS KELAMIN					
		CPNS			PNS		
		PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
IV/d	1	0	0	0	1	0	1
IV/e	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN IV	37	0	0	0	14	23	37
JUMLAH	117	4	8	12	41	64	105

GOLONGAN	JUMLAH	STATUS PEGAWAI/ JENIS KELAMIN		
		PPPK		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5
III	3	1	2	3
V	16	13	3	16
VII	4	-	4	4
IX	65	25	40	65
X	1	0	1	1
JUMLAH GOLONGAN	89	39	50	89

Honoror	PENDIDIKAN														Total	Ket
	S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Honoror	0	0	2	9	1	2	12	2	3	0	0	0	18	13	31	-
TKPD	PENDIDIKAN														Total	Ket
	S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
TKPD	0	0	1	6	0	0	5	1	1	0	0	0	7	7	14	-
Jumlah	0	0	3	15	1	2	17	3	4	0	0	0	25	20	45	-

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan UPT Dinas (UPTD) berdasarkan golongan, terbanyak adalah golongan IV sebanyak 37 orang atau sebesar 31,62%, golongan III sebanyak 70 orang atau sebesar 59,83%,

golongan II sebanyak 9 orang atau sebesar 7,62%, dan golongan I sebanyak 1 orang atau sebesar 0,85%, dilihat dari responsive gender jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pegawai laki-laki, dapat dilihat dari total keseluruhan jumlah pegawai perempuan sebanyak 72 orang (61,54%), sedangkan pegawai laki – laki sebanyak 45 orang (38,46%).

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan tentu tidak terlepas adanya sarana dan prasarana yang cukup. Berbagai sarana dan prasarana yang ada dirasakan sudah cukup memadai.

Jenis aset yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang mendukung operasional kegiatan meliputi :

1. Tanah bangunan kantor
2. Tanah bangunan rumah
3. Peralatan dan mesin terdiri dari :
 - a. Alat-alat angkutan (Roda dua dan roda empat)
 - b. Alat-alat pertanian dan peternakan
 - c. Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - d. Alat-alat studio dan komunikasi
4. Bangunan gedung
5. Instalasi
6. Buku perpustakaan
7. Hewan/ternak

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Ketersediaan energi	-	-	-	2,400	2400	2200	2400	2400	2.181	2167	2090,24	2.174	2.105	86.05	90.29	95,01	90,58	87,71
2	Ketersediaan protein	-	-	-	63	63	79	63	63	78.42	78,36	76,61	64.59	59.82	103	124	96,97	102,52	94,95
3	Penurunan Rawan Pangan (%)	-	-	-	1	1	1	1	1	1.03	0.82	0.82	0.8	0.8	103	82	82	80,00	80,00
4	Cadangan Pangan Daerah(Ton)	-	-	-	827	835	843	852	10	884.24	818	796,68	749,384	0	106.92	97.96	94,51	87,96	0,00
5	Harga Pangan Stabil	-	-	-	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	11.60	8,8	12,4	8.62	7.4	100	100	100	100	100
6	Pola Pangan Harapan (Skor)	-	-	-	95.60	87,9	89,7	91,5	93,9	86.20	86,1	89.73	94,2	93,8	90.17	97.95	100,03	102,95	99,89
7	Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8.	Sertifikat dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	-	-	203	375	263	288	318	307	408	420	472	654	151.23	108.8	159,7	163,89	205,66
9	Produksi Daging (Ton)	-	-	-	90,755	95.290	100.054	105.057	149142	116,888	115.371	129.865	119.141	173.795	128.80	121.07	129,79	113,41	116,53
10	Produksi Susu (liter)	-	-	-	140,247	104.552	72.817	80.098	32101	68,906	30.282	21197,1	7267,59	10202,33	49.13	28.01	29,11	9,07	31,78
11	Produksi Telur (ton)	-	-	-	99,573	147.259	109.780	115.269	232762	149,2	168.409	172.889	176.242	242.259	149.84	114.36	157,49	152,90	137,46

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi	25.179.330.363	26.156.304.030	31.637.418.500	41.107.813.661	33.510.697.567	21.687.762.998	24.792.878.353	29.304.621.023	36.993.239.289,72	30.887.710.383	86,13%	94,92%	92,63%	89,99%	92,17%	4,54%	5,28%
- Belanja Pegawai	17.135.310.000	14.438.439.000	17.236.725.000	16.991.749.661	20.037.584.920	13.988.553.621	13.476.503.853	15.564.972.883	15.863.040.833	17.914.322.913	81,64%	93,34%	90,30%	93,36%	89,40%	2,54%	3,34%
- Belanja Barang dan Jasa	7.652.648.363	11.717.865.030	14.400.693.500	24.116.064.000	13.473.112.647	7.308.381.777	11.316.374.500	13.739.648.140	21.130.198.456,72	12.973.387.470	95,50%	96,57%	95,41%	87,62%	96,29%	12,42%	11,43%
- Belanja Hibah	391.372.000	-	-	-	-	390.827.600	-	-	-	-	99,80%	-	-	-	-	-12,50%	-12,50%
Belanja Modal	330.060.000	727.934.970	1.179.000.000	277.000.000	-	329.390.750	725.549.500	1.160.427.726	271.539.600	-	99,80%	99,67%	98,42%	98,03%	-	0,75%	0,45%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	324.810.000	527.934.970	1.179.000.000	160.000.000	-	324.140.750	525.577.500	1.160.427.726	156.539.600	-	99,79%	99,55%	98,42%	97,84%	-	-0,07%	-0,45%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	200.000.000	-	-	-	-	199.972.000	-	-	-	-	99,99%	-	-	-	-12,50%	-12,50%
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.250.000	-	-	-	-	5.250.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-12,50%	-12,50%
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	117.000.000	-	-	-	-	115.000.000	-	-	-	-	98,29%	-	-12,50%	-12,50%
JUMLAH	25.509.390.363	26.884.239.000	32.816.418.500	41.384.813.661	33.510.697.567	22.017.153.748	25.518.427.853	30.465.048.749	37.264.778.889,72	30.887.710.383	86,31%	94,92%	92,83%	90,04%	92,17%	4,32%	5,06%

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mencerminkan pemangku kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari kebijakan, program, dan kegiatan Ketahanan pangan dan peternakan, sebagai berikut:

1. Petani dan Peternak
 - a. Peternak sapi, kambing, unggas, dan hewan ternak lainnya
 - b. Kelompok tani dan kelompok peternak
 - c. Gabungan kelompok tani (Gapoktan)
 - d. Kelompok Wanita Tani
2. Pelaku Usaha Pangan dan Peternakan
 - a. UMKM bidang pangan segar dan olahan hasil ternak
 - b. Pelaku usaha Pangan, pembibitan, pakan, penggemukan, dan pengolahan hasil peternakan
 - c. Distributor dan pelaku rantai pasok (logistik pangan dan ternak)
 - d. Rumah potong hewan (RPH), rumah potong unggas (RPU)
3. Masyarakat Umum
 - a. Konsumen rumah tangga sebagai penerima manfaat stabilitas dan keamanan pangan
 - b. Rumah tangga rawan pangan dan gizi
4. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait
 - a. Pemerintahan Pusat (Bapanas, Kementan, BPS dll)
 - b. Pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan
 - c. OPD lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, dll.)
 - d. Pemerintah desa dan kecamatan dalam pelaksanaan program pangan dan peternakan

5. Penyuluh dan Tenaga Teknis

- a. Penyuluh pertanian dan peternakan lapangan
- b. Petugas kesehatan hewan dan paramedis veteriner
- c. Petugas laboratorium dan teknisi pengujian mutu pangan dan ternak

6. Lembaga Pendidikan dan Penelitian

- a. Sekolah menengah kejuruan (SMK) pertanian/peternakan (SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa)
- b. Perguruan tinggi di bidang pertanian/peternakan (Universitas Sriwijaya)
- c. Lembaga penelitian (BPTP, Balitvet, BBKP dll)

7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi dan Komunitas

- a. LSM di bidang ketahanan pangan, peternakan, dan pemberdayaan masyarakat
- b. Organisasi profesi seperti PDHI, ISPI dll
- c. Organisasi kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna dll)

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dalam pemberian pelayanan serta bentuk dukungan dan kerja sama yang mendukung pencapaian sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
2. Kementerian Pertanian RI (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
6. Badan Pusat Statistik
7. Pemerintah Daerah Provinsi (Perangkat Daerah terkait)

8. Pemerintah Kab/Kota (Perangkat Daerah yang mebidangin Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan)
9. Penguruhan Tinggi jurusan pertanian/peternakan
10. Badan Urusan Logistik (Bulog)
11. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung program kerja untuk mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Bank Sumsel Babel
2. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan (Bank BPR Sumsel)

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan membangun kerja sama lintas pihak sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi penyelenggaraan pelayanan publik. Kerja sama ini dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan memperkuat kapasitas, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan sektor ketahanan pangan dan peternakan. Adapun bentuk Kerjasama dimaksud sebagai berikut:

1. Kerja sama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) dan Vaksin Rabies, Penyediaan Bibit melalui bantuan Straw sapi dalam Inseminasi Buatan (IB) dan bantuan Pakan ternak untuk pengemukan Hewan ternak, kerja sama dalam penerbitan nomor control veteriner (NKV) untuk produk-produk hewani.
2. Kerja sama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa Gerakan Pasar Murah (GPM), beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), Rumah Pangan Lestari (Pemberian makan anak stunting, ibu

hamil, Ibu Menyusi dan lasia), pembuatan Peta Kerawanan Pangan dan dalam perhitungan Indek Ketahanan pangan dan revalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) dalam mendukung pencapaian target IKD Provinsi Sumatera Selatan.

3. Kerja sama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pemerintah Provinsi dan Dinas Kab/Kota (Dinas Terkait), CSR BUMD (Bank Sumsel) dan BUMN (Bank Mandiri, Bank BRI, PT Pusri, dll) dalam mendukung Program Strategis Kepala Daerah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan berupa bantuan lahan perkarangan (bibit tumbuhan, bibit hewan ternak, dll).
4. Kerja sama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dengan Penguruhn Tinggi Sumsel Fasilitasi magang, KKN tematik, dan praktek lapangan bagi mahasiswa di unit pelaksana teknis Dinas dan Kegiatan pelatihan bersama bagi petani, peternak, dan petugas lapangan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2025-2029 disusun rencana kinerja setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan, yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam mencapai target di atas adalah:

1. Dalam menghitung Prevalence of Undernourishment (PoU) mencakup tantangan metodologis, data yang kurang akurat atau sulit didapat, serta isu struktural seperti daya beli, logistik, dan kebijakan yang belum terintegrasi.

2. Kurangnya pembinaan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dikarenakan keterbatasan dana operasional sehingga pembinaan dan pendampingan belum optimal.
3. LUPM/Gapoktan belum sepenuhnya menjadwalkan pembelian gabah pada waktu panen, sehingga stok gudang sering mengalami kekosongan.
4. Adanya perubahan regulasi dalam penentuan Harga Acuan Pemerintah (HAP) tentang kualitas mutu beras dan komoditas pangan pokok lainnya
5. Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat luas.
6. Faktor penentu dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di setiap daerah berbeda-beda, maka pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda-beda pada setiap kecamatan. Dengan menentukan faktor penentu kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kecamatan, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil keputusan untuk aksi yang paling sesuai guna mencapai tujuan ketahanan pangan.
7. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sehingga stok yang ada di gudang Bulog Divre Sumsel dan Babel semakin berkurang akibat setiap tahunnya terjadi bencana alam yang membutuhkan bantuan bahan pangan dari pemerintah
8. untuk mencapai PPH ideal perlu dimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya dan beberapa kelompok pangan lain seperti kacang-kacangan, buah/biji berminyak dan gula.
9. Masih adanya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar dipasar (Pasar Tradisional dan Pasar Modern) yang masih mengandung cemaran bahan pestisida hal ini terjadi karena terlalu dekatnya waktu penyemprotan hama dengan masa panen serta tidak dilakukan pencucian Produk sebelum dipasok kepasar.
10. Masih kurangnya pengawasan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang ada ditingkat produsen, pemasok/ritel dan Penjual/Pedagang karena keterbatasan anggaran serta

dukungan dan kerjasama dari pihak pengusaha/pelaku peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) mulai dari Free Market sampai ke Post Market.

- 11. Kurangnya pengetahuan peternak tentang manajemen ternak yang baik, hama dan penyakit ternak sehingga dapat menyebabkan kematian ternak yang tinggi.
- 12. Munculnya wabah penyakit hewan menular strategis seperti Septicaemia epizootica, Jembrana, dan Rabies secara sporadik;
- 13. Petugas dokter hewan, paramedik veteriner, dan petugas kesehatan hewan lainnya di kabupaten/kota masih sangat kurang;
- 14. Minimnya pelatihan peningkatan kapasitas untuk SDM di bidang kesehatan hewan;
- 15. Dana pendampingan pelaksanaan kegiatan tidak ideal;
- 16. Tidak ada operasional pelayanan kesehatan hewan;
- 17. Kurangnya pengetahuan dan informasi terkait penanggulangan penyakit hewan baik komoditas ternak maupun hewan kesayangan di tingkat masyarakat;

2.2.2 Isu Strategis

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan banyak menghadapi kendala, masalah dan isu-isu yang berkembang. Isu-isu tersebut perlu mendapatkan perhatian dan solusi penyelesaiannya. Identifikasi isu strategis perangkat daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan isu lingkungan dinamis di tingkat global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis dirumuskan dari berbagai dokumen dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kertas kerja dalam Tabel Isu Strategis Perangkat Daerah berikut ini :

Tabel. 2.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ketahanan Pangan a. Indeks	1 Kurangnya upaya untuk menurunkan	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di dalam	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian memiliki	Visi, Misi dan Program Strategis	-Pemahaman dan kemampuan pegawai

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketahanan Pangan: 77,52	angka penduduk	KLHS RTRW	(TPB) atau	kebijakan biru	Sumatera	terhadap aspek-
b. Prevalensi	yang konsumsinya	Provinsi Sumatera	Sustainable	(blue print)	Selatan	aspek ketahanan
Ketidakcukupan	kurang dari	Selatan Tahun	Development	peternakan	Tahun 2025-	pangan masih
Konsumsi	standar	2023-2042 yaitu:	Goals (SDGs)	yang	2029.	kurang.
Pangan (POU) : 5,75%	kecukupan energi	“Transisi energi	yang terkait	bertujuan	Visi:	-Pendidikan dan
c. Pernsetase 2	untuk hidup	terbarukan/rendah	dengan Dinas	untuk	Sumsel Maju	pelatihan (Diklat)
Cadangan	sehat.	“Pengelolaan	Ketahanan	membangun	Terus Untuk	Teknis maupun
Pangan : 50%	Daerah yang	komoditas	Pangan dan	ketahanan	Semua	Fungsional
d. Skor PPH : 94.1	terdampak oleh	unggulan yang	Peternakan	pangan		masih kurang.
Skor	bencana alam	tahan terhadap	adalah TPB 2:	berkelanjutan	Misi ke -2:	-Sarana dan
e. Persentase	sering terisolir	perubahan iklim”	Tanpa	melalui	Mewujudkan	prasarana kerja
Daerah Rentan	sehingga sulit		Kelaparan,	pengembangan	ketahanan	masih kurang
Rawan Pangan:	untuk dijangkau,		TPB 3:	peternakan	ekonomi	-Belum semua
1%	transportasi masih		Kehidupan	yang ramah	berbasis	kegiatan yang
f. Persentase	terbatas		Sejahtera,	lingkungan.	sumberdaya	menunjang
Pangan Segar	menyebabkan		TPB 12:	Kebijakan ini	lokal dan	tugas pokok dan
Memenuhi	pendistribusian		Konsumsi dan	mencakup	berkelanjutanda	fungsi Dinas
Persyaratan dan	bantuan cadangan		Produksi yang	aspek,	lam kerangka	Peternakan
Mutu	pangan		Bertanggung	termasuk	ekonomi	didukung belum
Keamanan	pemerintah sering		Jawab dan	peningkatan	kerakyatan	memadainya
Pangan : 92%	terlambat diterima		TPB 15:	produktivitas	yang	jumlah tenaga
g. Ketersediaan	oleh masyarakat		Ekosistem	sapi,	berkeadilan	teknis
Energi	Masih adanya		Darat	pengembangan	untuk	peternakan baik
Kkal/Kap/Hari,	Pangan Segar Asal			industri	meningkatkan	tenaga di
Protein gram	Tumbuhan (PSAT)			pengolahan	pendapatan	Provinsi maupun
per Kap/Hari : 2400	yang beredar			susu, dan	masyarakat.	di
Kkal/Kap/Hari dan 63	dipasar (Pasar			peningkatan		kabupaten/Kota;
gram/Kap/Hari	Tradisional dan			pendapatan		-Kondisi
h. Penyediaan	Pasar Moderen)			peternak.	Misi 3	produktivitas
Infrastruktur	yang masih			-Pembangunan	Mewujudkan	hasil peternakan
Pendukung	mengandung			Peternakan	keterkaitan	pada umumnya
Kemandirian	pestisida hal ini			Berkelanjutan:	(nexus) yang	masih rendah
Pangan Lainnya	terjadi karena			Kementerian	kuat antara	terutama
: 8 Kab/Kota	terlalu dekatnya			Pertanian	ketahanan	peternakan
	waktu			berupaya	pangan,	rakyat.
	penyemprotan			membangun	ketahanan	Rendahnya
	hama dengan			peternakan yang	energi dan	produktivitas
2. Peternakan	masa panen serta			berkelanjutan	kedaulatan	hasil karena
a. Produksi Daging	tidak dilakukan			dengan	air sebagai	penerapan
: 159.642 ton	pencucian Produk			pendekatan	upaya	teknologi maju
b. Produksi Telur :	sebelum dipasok			ramah	mengatasi	belum optimal,
267.198 Ton	kepasaran.			lingkungan untuk	perubahan	karena
c. Jumlah daerah	Masih kurangnya			menjawab	iklim.	keterbatasan
terdampak	pengawasan			tantangan global.	Program	modal dan
wabah Penyakit	produk Pangan			-Swasembada	Strategis:	pengetahuan,
Hewan Menular	Segar Asal			Daging Sapi:	Gerakan Sumsel	sebagian besar
Strategis	Tumbuhan (PSAT)					peternak
	yang ada ditingkat					berskala usaha
						kecil, belum

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
d. (PHMS) yang dikendalikan: 17 Laopran e. Jumlah unit usaha produk hewan yang disertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) : 20 Sertifikat f. Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan: 100%	produsen, pemasok/ritel dan Penjual/Pedagang karena keterbatasan anggaran serta dukungan dan kerjasama dari pihak pengusaha/pelaku peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) mulai dari Free Market sampai ke Post Market 4 masih kurangnya tenaga penyuluh 5 Petugas dokter hewan, paramedik veteriner, dan petugas kesehatan hewan lainnya di kabupaten/kota masih sangat kurang 6 Banyak pelaku usaha produk hewan di Provinsi Sumatera Selatan belum mengetahui pentingnya Nomor Kontrol Veteriner			Pemerintah juga menargetkan swasembada daging sapi pada tahun 2026 melalui berbagai upaya peningkatan populasi sapi dan pengembangan peternakan sapi potong. -Peningkatan Produktivitas: Target peningkatan produktivitas sapi perah mencakup peningkatan produksi susu hingga 20 liter/ekor/hari atau 6.000 liter per ekor per laktasi. -Pengembangan Industri: Terdapat upaya untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan target pertumbuhan rata-rata 10% per tahun. -Kesejahteraan Peternak: Peningkatan pendapatan peternak juga menjadi perhatian, dengan target minimal Rp	Mandiri Pangan (GSMP).	menggunakan bibit unggul, serta rendahnya penerapan pasca panen dan penggunaan obat-obatan; -Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Peternak, sehingga berdampak pada proses pengembangan kelompok yang terhambat, rendahnya penyerapan kredit usaha peternakan dan penerapan teknologi; -Lembaga mitra swasta belum berperan nyata sebagai tenaga Pembina dan pengembangan usaha. Sehingga peternak berskala kecil sulit untuk mengalami kemajuan dari usahataninya.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				244 juta per kapita per tahun. -Penggunaan Produk Dalam Negeri: Kebijakan susu gratis mewajibkan penggunaan susu segar dari peternak dalam negeri minimal 50%.		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi serta tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di tahun 2025-2029. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan adalah

“Meningkatnya Ketahanan Pangan”

3.2 Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan serta harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah bisa capai Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.

Dalam penentuan target tahun 2025-2029 dilakukan secara rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai data baseline, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	74,07	77,52	79,79	82,08	84,38	86,69	89,01	
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (POU)	5.97	5.75	5.36	4.88	4.40	4.00	3.45	
		Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	93,8	94,1	94,4	94,7	95,0	95,3	95,6	
			Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hari, Protein gram/Kap/Hari	2,105/59,82	2400/63	2400/63	2400/63	2400/63	2400/63	2400/63	
		Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah	Persentase Cadangan Pangan	0	50	52	54	56	58	60	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0,8	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani Peternak	99,64	101,75	102,77	103,80	104,63	105,46	105,80	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	- Jumlah Produksi Daging	167.514	175.890	184.684	193.918	203.614	213.795	224.485	
			- Jumlah Produksi Telur	248.538	260.965	274.013	287.714	302.099	317.204	333.064	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	

3.3 Strategi

Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuannya dengan cara :

1. Memantapkan Ketersediaan Pangan dengan penyediaan energi perkapita minimal 2.400 kilo kalori/kap/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gram/hari;
2. Meningkatnya penanganan rawan pangan dengan ditandai jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1 % setiap tahun;
3. Terlaksananya sistem Distribusi yang efisien, efektif dan Stabilitas Harga Pangan Strategis;
4. Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. (Beragam, Bergizi, Seimbang da Aman/B2SA)
5. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Pendapatan Peternakan dengan konsentrasi pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak ruminansia besar.
6. Penanggulangan penyakit yang bersifat zoonosis (Brucellosis, SE, Rabies, Avian Influenza, Penyakit Mulut dan Kuku) serta pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis.
7. Meningkatkan kualitas Hijauan Pakan Ternak (HPT), penggemukan sapi, Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA).
8. Mengoptimalkan pengembangan kawasan sentra peternakan dan kawasan plasma nutfah guna memenuhi kebutuhan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
9. Meningkatkan ketersediaan pakan ternak dengan Pemanfaatan sumberdaya lokal dan penyediaan sapsras peternakan.

3.4 Penahapan Pembangunan

Penahapan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu strategi perencanaan yang disusun secara bertahap dan sistematis oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan selama periode lima atau enam tahun (sesuai dengan siklus RPJMD atau RPJPN). Penahapan ini digunakan untuk mengatur fokus dan skala pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya agar capaian pembangunan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam penahapan Renstra, masing-masing tahun dirancang dengan prioritas tertentu yang disesuaikan dengan kondisi awal (baseline), ketersediaan anggaran, kesiapan sumber daya, serta urgensi permasalahan. Misalnya, tahun pertama biasanya difokuskan pada pemetaan, persiapan, penguatan kelembagaan, dan pengumpulan data dasar. Tahun-tahun berikutnya berfokus pada pelaksanaan program strategis seperti pembangunan fisik, peningkatan kapasitas, atau pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tahun terakhir digunakan untuk evaluasi, replikasi keberhasilan, dan penyusunan strategi lanjutan.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan secara logis, terstruktur, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah tidak hanya menjalankan kegiatan secara rutin, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tabel penahapan Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Penguatan kelembagaan dan infrastruktur dasar ketahanan pangan dan peternakan - Peningkatan akurasi data dan sistem informasi - Penyusunan roadmap program prioritas	- Implementasi program prioritas: peningkatan produksi pangan lokal dan populasi ternak - Intervensi pengurangan daerah rawan pangan - Penguatan sistem pengawasan kesehatan hewan dan keamanan pangan	- Pengembangan diversifikasi pangan dan produk peternakan bernilai tambah - Penguatan kemitraan dengan dunia usaha, BUMD, dan perguruan tinggi - Ekspansi program pemberdayaan petani/peternak	- Konsolidasi capaian: peningkatan cadangan pangan daerah - Penguatan pengelolaan risiko pangan dan kesehatan hewan - Peningkatan kualitas layanan publik di bidang pangan dan peternakan	- Evaluasi akhir Renstra dan integrasi capaian pembangunan pangan & peternakan - Penyiapan model keberlanjutan program - Optimalisasi kontribusi sektor pangan-peternakan terhadap ekonomi daerah

3.5 Penyajian Lokus

Lokasi fokus (Lokus) prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah berada di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus utama pada pengembangan sektor Ketahanan Pangan dan Peternakan. Sektor Ketahanan Pangan, meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan bergizi, serta cadangan pangan daerah, sedangkan sektor Peternakan meliputi peningkatan populasi dan produktivitas ternak, kesehatan hewan, serta pengembangan usaha peternakan rakyat.

3.6 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			1. Mengembangkan sistem distribusi untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan 2. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif 3. Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan 4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal Penganekaragaman konsumsi yang bergizi, seimbang dan aman. 5. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar dan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			pangan segar asal tumbuhan yang bersertifikat/terregistrasi 6. Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis 7. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan Peningkatan kemampuan teknis masyarakat peternakan yang berkualitas dan mandiri. 8. Melakukan edukasi mengenai produk-produk peternakan pada kelompok masyarakat dan usia dini 9. Mengoptimalkan peran tenaga medis, paramedis dan veteriner serta menambah jumlah tenaga inseminator dan mantra hewan di wilayah sentra produksi peternakan. 10. Melakukan pembinaan dan Revitalisasi fungsi dan aktivitas Rumah Potong Hewan (RPH)	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran strategis terdapat beberapa strategi kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa program sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Program-program tersebut, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Program-program tersebut harus sejalan dengan outcome yang dihasilkan dengan indikatornya masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Dari program-program tersebut diuraikan kembali menjadi kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2. Uraian Kegiatan

Beberapa kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
9. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
10. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
11. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
12. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
13. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
14. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
15. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
16. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
17. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
18. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
19. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
20. Penataan Prasarana Pertanian
21. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
22. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

23. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
24. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
25. Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
26. Kesejahteraan Hewan
27. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
28. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, SubDistributor) Obat Hewan
29. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
30. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
31. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Dinas ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Sumatera Selatan dari indikator kinerja untuk setiap program, sub program dan kegiatan yang direncanakan selama kurun waktu tahun 2025-2029 yang lebih rinci telah dikemukakan pada Tabel 4.1 dan Tabel. 4.2.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 3 Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.	Meningkatnya Ketahanan Pangan				Indeks Ketahanan Pangan		
					Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (POU)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah			Persentase Cadangan Pangan		
			Meningkatnya kemandirian pangan daerah		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
						Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			Tersedianya cadangan pangan daerah		Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
				Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
		Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Skor Pola Pangan Harapan dan Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hari, Protein gram per Kap/Hari		
			Meningkatnya keterjangkauan dan stabilitas pasokan pangan		Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Jumlah Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
				Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Distribusi Pangan Provinsi	
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
				Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
						Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
						Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
				Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		
			Menurunnya prevalensi kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan			Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan		
			Meningkatnya jaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
						Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
				Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
		Meningkatnya Kesejahteraan Peternak			Nilai Tukar Petani Peternak		
		Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya produktivitas peternakan		Jumlah Produksi Daging dan Jumlah Produksi Telur	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pakan Kewenangan Provinsi	Pakan Kewenangan Provinsi	Pakan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	
						Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	
				Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah Provinsi Lain	
				Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
				Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
			Meningkatnya produktivitas peternakan		Jumlah Produksi Daging dan Jumlah Produksi Telur	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penataan Prasarana Pertanian	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
				Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	
						Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Rumpun/Galur Ternak	
				Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Menular Strategis (PHMS) dan Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Menular Strategis (PHMS) dan Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
						Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Lintas Daerah Provinsi	
				Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
				Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
				Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
						Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
				Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	
				Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
				Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
				Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
						Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	
						Kesejahteraan Hewan	
				Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Hewan yang Ditangani	Hewan yang Ditangani	Hewan sesuai Kewenangannya	
				Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	
		Meningkatnya Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Pternakan)			Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Pternakan)		
			Meningkatnya Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Pternakan)		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Pternakan)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
				Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	
		Meningkatnya Usaha Pertanian yang memiliki perizinan			Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan		
			Meningkatnya Perizinan Usaha Pertanian		Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan		
						Penerbitan Izin Usaha Pengecer	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(Toko, Retail, SubDistributor) Obat Hewan	
				Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
		Meningkatnya SDM Bidang Penyuluh Pertanian			Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan		
			Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluh		Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	
						Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
				Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	

Tabel 4.2. Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintah Bidang Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	74,07	79,31	29.542.827.200	79,79	37.209.383.000	82,08	42.693.059.700	84,38	47.381.008.785	86,69	50.662.794.544	89,01	53.816.404.655		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	26.947.278.200	100%	35.032.738.000	100%	36.878.059.700	100%	40.081.008.785	100%	41.302.394.544	100%	42.439.304.655		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	419.675.000	100%	350.000.000	100%	525.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	1.100.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dok	227.600.000	4 Dok	200.000.000	3 Dok	225.000.000	2 Dok	300.000.000	3 Dok	300.000.000	2 Dok	465.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	20.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	15.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Lap	58.575.000	6 Lap	0	6 Lap	75.000.000	6 Lap	100.000.000	6 Lap	100.000.000	6 Lap	200.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Lap	133.500.000	2 Lap	150.000.000	2 Lap	175.000.000	2 Lap	200.000.000	2 Lap	200.000.000	2 Lap	350.000.000		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data	0	0 Data	0	1 Data	12.500.000	1 Data	12.500.000	1 Data	12.500.000	1 Data	25.000.000		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	12.500.000	1 Dok	12.500.000	1 Dok	12.500.000	1 Dok	25.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	22.355.912.000	100%	31.641.034.000	100%	32.313.059.700	100%	32.956.008.785	100%	33.612.394.544	100%	34.339.304.655		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/Bulan	217 Org/Bln	22.215.912.000	217 Org/Bln	31.481.034.000	217 Org/Bln	32.113.059.700	217 Org/Bln	32.756.008.785	217 Org/Bln	33.412.394.544	217 Org/Bln	34.089.304.655		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dok	140.000.000	1 Dok	160.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	250.000.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	75.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	100%	200.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0	0 paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	250 Paket	375.000.000	0 Paket	0		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Org	75.000.000	20 Org	50.000.000	20 Org	100.000.000	20 Org	100.000.000	20 Org	125.000.000	20 Org	200.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	760.500.000	100%	537.000.000	100%	715.000.000	100%	820.000.000	100%	905.000.000	100%	1.300.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	112.000.000	8 Paket	50.000.000	8 Paket	75.000.000	8 Paket	75.000.000	8 Paket	75.000.000	8 Paket	200.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	34 Paket	100.000.000	34 Paket	50.000.000	34 Paket	75.000.000	34 Paket	100.000.000	34 Paket	125.000.000	34 Paket	150.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	116.500.000	19 Paket	30.000.000	19 Paket	50.000.000	19 Paket	50.000.000	19 Paket	50.000.000	19 Paket	100.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	50.000.000	20 Paket	50.000.000	20 Paket	75.000.000	20 Paket	80.000.000	20 Paket	85.000.000	20 Paket	150.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	75.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	75.000.000	2 Paket	75.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	150.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4 Dok	7.000.000	5 Dok	7.000.000	5 Dok	15.000.000	5 Dok	15.000.000	5 Dok	20.000.000	5 Dok	50.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	300.000.000	1 Lap	300.000.000	1 Lap	350.000.000	1 Lap	425.000.000	1 Lap	450.000.000	1 Lap	500.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	170.000.000	100%	100.000.000	100%	350.000.000	100%	2.350.000.000	100%	1.850.000.000	100%	750.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	2.000.000.000	5 Unit	1.500.000.000	0 Unit	0		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	200.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	200.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	3 Paket	85.000.000	3 Paket	50.000.000	3 Paket	75.000.000	3 Paket	150.000.000	3 Paket	150.000.000	3 Paket	250.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	85.000.000	1 Unit	50.000.000	10 Unit	75.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	300.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	2.456.337.200	100%	1.721.104.000	100%	2.125.000.000	100%	2.330.000.000	100%	2.685.000.000	100%	3.550.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Lap	17.000.000	1 Lap	17.000.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	35.000.000	1 Lap	50.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Lap	529.174.200	4 Lap	530.000.000	4 Lap	600.000.000	4 Lap	700.000.000	4 Lap	800.000.000	4 Lap	1.000.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Lap	1.910.163.000	2 Lap	1.174.104.000	2 Lap	1.500.000.000	2 Lap	1.600.000.000	2 Lap	1.850.000.000	2 Lap	2.500.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	709.854.000	100%	633.600.000	100%	750.000.000	100%	875.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	33 Unit	303.854.000	33 Unit	283.600.000	33 Unit	400.000.000	33 Unit	450.000.000	39 Unit	500.000.000	44 Unit	550.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	25.000.000	10 Unit	25.000.000	10 Unit	50.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	156.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	250.000.000	2 Unit	250.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	5 Unit	250.000.000	5 Unit	250.000.000	5 Unit	250.000.000	5 Unit	250.000.000	5 Unit	325.000.000	5 Unit	350.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0%	50%	0	52%	0	54%	75.000.000	56%	125.000.000	58%	200.000.000	60%	250.000.000		
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi yang tersedia	100%	100%	0	100%	0	100%	75.000.000	100%	125.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000		
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	0	0 unit	0	8 Unit	75.000.000	8 Unit	125.000.000	8 Unit	200.000.000	8 Unit	250.000.000	GSMP	Swasembad a Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	93,80%	94,10%	1.814.319.000	94,40%	1.486.645.000	94,70%	3.800.000.000	95%	4.925.000.000	95,30%	6.600.400.000	95,60%	8.002.100.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hari, Protein gram/Kap/Hari	2,105/59,82	2400/63		2400/63		2400/63		2400/63		2400/63		2400/63			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang tersedia dan tersalurkan	100%	100%	402.774.000	100%	370.000.000	100%	1.225.000.000	100%	1.625.000.000	100%	2.450.000.000	100%	3.100.000.000		
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	0 Lap	0	0 Lap	0	1 Lap	75.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	175.000.000	1 Lap	200.000.000	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	1 Lap	75.000.000	1 Lap	125.000.000	1 Lap	150.000.000	1 Lap	175.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	500.000.000	1 Dok	700.000.000	1 Dok	1.000.000.000	1 Dok	1.300.000.000	GSMP	Swasembad a Pangan
Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	1 Lap	100.000.000	1 Lap	150.000.000	1 Lap	450.000.000	1 Lap	650.000.000	Program Kesejahteraa n dan Kesehatan Perempuan dan Anak	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	4 Laporan	4 Lap	44.800.000	0 lap	0	1 Lap	100.000.000	1 Lap	125.000.000	1 Lap	150.000.000	1 Lap	175.000.000	-	-
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan	0 Lap	0	1 Lap	150.000.000	1 Lap	225.000.000	1 Lap	250.000.000	1 Lap	275.000.000	1 Lap	300.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	5 Unit	5 Unit	236.000.000	1 Unit	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 Dokumen	1 Dok	121.974.000	1 Dok	120.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	175.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	300.000.000	-	-
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi yang terlaksana	100%	100%	205.300.000	100%	200.000.000	100%	925.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.700.400.000	100%	1.802.100.000		
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	100.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	250.000.000	-	-
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0 Ton	93,24 Ton	0	96,96 Ton	0	100,69 Ton	75.000.000	104,42 Ton	100.000.000	108,15 Ton	136.400.000	111,88 Ton	141.100.000	-	-
Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0 Ton	12 ton	205.300.000	15 ton	200.000.000	100,69 Ton	750.000.000	104,42 Ton	1.000.000.000	108,15 Ton	1.364.000.000	111,88 Ton	1.411.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Persentase Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang terlaksana	100%	100%	0	100%	0	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0 Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	1 Lap	100.000.000	1 Lap	125.000.000	1 Lap	150.000.000	1 Lap	150.000.000	-	-
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi yang terlaksana	100%	100%	1.206.245.000	100%	916.645.000	100%	1.550.000.000	100%	1.925.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.950.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Dokumen	6 Dok	281.100.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	1.000.000.000	GSMP	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	0 Laporan	1 Lap	858.500.000	1 Lap	600.000.000	1 Lap	1.000.000.000	1 Lap	1.250.000.000	1 Lap	1.500.000.000	1 Lap	1.600.000.000	GSMP	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	0 Laporan	1 Lap	66.645.000	0 lap	0	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	125.000.000	1 Lap	150.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan	0 Lap	0	1 Lap	66.645.000	1 Lap	150.000.000	1 Lap	175.000.000	1 Lap	175.000.000	1 Lap	200.000.000	-	-
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1%	1%	456.800.000	1%	375.000.000	1%	1.200.000.000	1%	1.400.000.000	1%	1.600.000.000	1%	2.025.000.000		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi yang tersusun	100%	100%	0	100%	75.000.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0		
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	0 Dokumen	0 dok	0	1 Dok	75.000.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi yang terlaksana	100%	100%	456.800.000	100%	300.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.600.000.000	100%	2.025.000.000		
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Dokumen	7 Dok	456.800.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	700.000.000	1 Dok	800.000.000	1 Dok	900.000.000	1 Dok	1.000.000.000	-	-
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	0 Dok	0	0 dok	0	1 Dok	150.000.000	1 Dok	175.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	500.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	12 Lap	150.000.000	12 Lap	175.000.000	12 Lap	200.000.000	12 Lap	225.000.000	-	-
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	0 Dok	0	0 dok	0	1 Dok	200.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	-	-
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	98,75%	100%	324.430.000	100%	315.000.000	100%	740.000.000	100%	850.000.000	100%	960.000.000	100%	1.100.000.000		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100%	100%	324.430.000	100%	315.000.000	100%	740.000.000	100%	850.000.000	100%	960.000.000	100%	1.100.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	30 Sertifikat	40 Sertifikat	158.117.000	45 sertifikat	150.000.000	45 sertifikat	300.000.000	45 sertifikat	350.000.000	45 sertifikat	400.000.000	45 sertifikat	450.000.000	-	-
Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	0 Dokumen	42 Dok	81.354.000	1 Dok	75.000.000									-	-
Penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0 Dokumen	4 Dok	84.959.000	3 Dok	90.000.000	3 Dok	200.000.000	3 Dok	225.000.000	4 Dok	240.000.000	4 Dok	250.000.000	-	-
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	0 Dok	0	0 dok	0	3 Dok	90.000.000	3 Dok	100.000.000	4 Dok	120.000.000	5 Dok	150.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	0 Dok	0	0 dok	0	3 Dok	150.000.000	4 Dok	175.000.000	4 Dok	200.000.000	5 Dok	250.000.000	-	-
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				10.976.007.986		8.662.922.661		11.920.000.000		12.555.000.000		14.390.000.000		14.980.000.000		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Jumlah Produksi Daging - Jumlah Produksi Telur	167.514 248.538	175.890 260.965	3.811.391.186	184.684 274.013	1.090.000.000	193.918 287.714	3.070.000.000	203.614 302.099	3.380.000.000	213.795 317.204	3.690.000.000	224.485 333.064	4.325.000.000		
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang terlaksana	100%	100%	217.700.000	100%	260.000.000	100%	1.370.000.000	100%	1.680.000.000	100%	1.815.000.000	100%	2.050.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dok	0	3 Dok	60.000.000	3 Dok	320.000.000	3 Dok	455.000.000	4 Dok	490.000.000	4 Dok	500.000.000	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0 Laporan	1 Dok	217.700.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	1.150.000.000	2 Dok	1.250.000.000	2 Dok	1.450.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	0 orang	0	0 org	0	10 Org	50.000.000	10 Org	75.000.000	10 Org	75.000.000	10 Org	100.000.000	-	-
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang terlaksana	100%	100%	579.750.000	100%	500.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.525.000.000		
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 Laporan	1 Lap	472.000.000	1 Lap	400.000.000	1 Lap	1.000.000.000	1 Lap	1.000.000.000	1 Lap	1.000.000.000	1 Lap	1.300.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	0 Dokumen	1 Dok	107.750.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	225.000.000	-	-
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor yang terlaksana	100%	100%	0	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000		
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	75.000.000	1 Lap	100.000.000	-	-
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang tersedia	100%	100%	3.013.941.186	100%	330.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	3000 Ekor	3.013.941.186	3500 Ekor	330.000.000	4000 Ekor	500.000.000	4500 Ekor	500.000.000	5000 Ekor	600.000.000	5500 Ekor	650.000.000	GSMP	-
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Jumlah Produksi Daging - Jumlah Produksi Telur	167.514 248.538	175.890 260.965	1.247.020.000	184.684 274.013	770.000.000	193.918 287.714	700.000.000	203.614 302.099	875.000.000	213.795 317.204	975.000.000	224.485 333.064	1.350.000.000		
Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Pertanian yang terlaksana	100%	100%	1.055.450.000	100%	650.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	525.000.000	100%	850.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0 Lap	0	0 lap	-	1 Lap	100.000.000	1 Lap	150.000.000	1 Lap	150.000.000	1 Lap	250.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1 Unit	687.050.000	1 Unit	550.000.000									-	-
Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, KlinikHewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit	1 Unit	368.400.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	375.000.000	1 Unit	600.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	100%	100%	191.570.000	100%	120.000.000	100%	300.000.000	100%	375.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000		
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	0 Laporan	1 Lap	191.570.000	1 Lap	120.000.000	1 Lap	250.000.000		300.000.000		350.000.000	1 Lap	350.000.000	-	-
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	1 Lap	50.000.000	1 Lap	75.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	150.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis - Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	100%	100%	792.600.000	100%	750.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.900.000.000	100%	3.025.000.000	100%	3.705.000.000		
		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peresentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	100%	100%	270.500.000	100%	400.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.225.000.000	100%	1.625.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	17 Laporan	1 Lap	270.500.000	1 Lap	200.000.000	17 Lap	375.000.000	17 Lap	400.000.000	17 Lap	400.000.000	17 Lap	525.000.000	-	-
Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	0 Lap	0	1 Lap	200.000.000	1 Lap	300.000.000	1 Lap	350.000.000	1 Lap	375.000.000	1 Lap	500.000.000	-	-
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	17 Lap	200.000.000	17 Lap	225.000.000	17 Lap	225.000.000	17 Lap	300.000.000	-	-
Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	0 Kasus	0	0 kasus	0	100 Kasus	200.000.000	100 Kasus	225.000.000	100 Kasus	225.000.000	100 Kasus	300.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi yang terlaksana	100%	100%	0	100%	0	100%	175.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	380.000.000		
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	2 Lap	75.000.000	3 Lap	100.000.000	4 Lap	150.000.000	5 Lap	200.000.000	-	-
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	10 Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	10 Lap	50.000.000	10 Lap	75.000.000	10 Lap	75.000.000	10 Lap	100.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	0 Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	1 Lap	50.000.000	1 Lap	75.000.000	1 Lap	75.000.000	1 Lap	80.000.000	-	-
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang terlaksana	100%	100%	395.800.000	100%	200.000.000	100%	850.000.000	100%	950.000.000	100%	975.000.000	100%	1.150.000.000		
Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	0 Unit	0 Unit	0	0 unit	0	1 Unit	50.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	100.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	10 Lap	50.000.000	10 Lap	50.000.000	10 Lap	50.000.000	10 Lap	100.000.000	-	-
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dok	395.800.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	350.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	425.000.000	1 Dok	500.000.000	-	-
Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 unit	0	20 Unit Usaha	100.000.000	20 Unit Usaha	100.000.000	20 Unit Usaha	100.000.000	20 Unit Usaha	100.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 unit	0	20 Unit Usaha	100.000.000	20 Unit Usaha	100.000.000	20 Unit Usaha	100.000.000	20 Unit Usaha	100.000.000	-	-
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 unit	0	30 Unit Usaha	100.000.000	30 Unit Usaha	100.000.000	30 Unit Usaha	100.000.000	30 Unit Usaha	100.000.000	-	-
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	0 Org	0	0 org	0	100 Org	50.000.000	100 Org	75.000.000	100 Org	75.000.000	100 Org	100.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Produk	0 Produk	0	0 produk	0	2 Produk	50.000.000	2 Produk	50.000.000	2 Produk	50.000.000	2 Produk	50.000.000	-	-
Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlaksana	100%	100%	126.300.000	100%	150.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	325.000.000	100%	350.000.000		
Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	0 Dokumen	15 Dok	126.300.000	15 dok	150.000.000	20 Dok	200.000.000	20 Dok	250.000.000	30 Dok	275.000.000	30 Dok	300.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	0 Orang	0 Org	0	0 org	0	5 Org	50.000.000	5 Org	50.000.000	5 Org	50.000.000	5 Org	50.000.000	-	-
Kesejahteraan Hewan	Persentase Kesejahteraan Hewan yang terlaksana	100%	100%	0	100%	0	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		
Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	0 Kasus	0	0 kasus	0	2 Kasus	50.000.000	2 Kasus	50.000.000	2 Kasus	50.000.000	2 Kasus	50.000.000	-	-
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	0 Sertifikat	0	0 sertifikat	0	20 Sertifikat	100.000.000	20 Sertifikat	150.000.000	20 Sertifikat	150.000.000	20 Sertifikasi	150.000.000	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Pernakan)	0%	100%	0	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi yang terlaksana	0%	100%	0	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000		
Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	0 Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	75.000.000	-	-
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	100%	100%	0	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, SubDistributor) Obat Hewan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, SubDistributor) Obat Hewan yang terlaksana	0%	100%	0	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000		
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0 Lap	0	0 lap	0	10 Lap	50.000.000	10 Lap	50.000.000	10 Lap	50.000.000	10 Lap	75.000.000	-	-
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	100%	100%	5.124.996.800	100%	6.052.922.661	100%	5.550.000.000	100%	5.300.000.000	100%	6.600.000.000	100%	5.450.000.000		
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang terlaksana	100%	100%	0	100%	0	100%	5.050.000.000	100%	5.100.000.000	100%	5.100.000.000	100%	5.150.000.000		
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	0 Org	0	0 org	0	208 Org	5.050.000.000	208 Org	5.100.000.000	208 Org	5.100.000.000	208 Org	5.150.000.000	GSMP	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian yang terlaksana	100%	100%	4.937.024.300	100%	4.932.922.661	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0		
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	300 Kelompok	324 Kelompok	4.937.024.300	324 Kelompok	4.932.922.661	0	0	0	0	0	0	0	0	GSMP	-
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang terlaksana	100%	100%	187.972.500	100%	1.120.000.000	100%	500.000.000	100%	200.000.000	100%	1.500.000.000	100%	300.000.000		
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	0 Unit	0	0 unit	0	17 Unit	500.000.000	17 Unit	200.000.000	17 Unit	1.500.000.000	17 Unit	300.000.000	-	-
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	17 Unit	17 Unit	187.972.500	17 unit	1.120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
JUMLAH				40.518.835.186		45.872.305.661		54.613.059.700		59.936.008.785		65.052.794.544		68.796.404.655		

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

Dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang telah diuraikan di Tabel 4.2, maka terdapat kegiatan/sub kegiatan prioritas yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah. Kegiatan/sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)		Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
			Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
2	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak		Sub Kegiatan Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

Indikator kinerja adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja akan menjelaskan bagaimana sasaran telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Tingkat pencapaian indikator kinerja akan memberikan informasi tentang kinerja organisasi. Apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai dan akurat, maka hal tersebut akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh.

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat penting pada saat merencanakan program dan kegiatan. Dengan menggunakan indikator kinerja, maka proses perencanaan akan mengatur dan menentukan langkah-langkah yang lebih tepat untuk pelaksanaan pembangunan suatu sektor. Penetapan indikator kinerja akan menghasilkan proses perencanaan yang berkualitas dan lebih obyektif serta terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan selama periode Renstra selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO .	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,07	77,52	79,79	82,08	84,38	86,69	89,01	Bapana s

NO .	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (POU)	%	5.97	5.75	5.36	4.88	4.40	4.00	3.45	
3	Nilai Tukar Petani Peternak	Nilai	99,64	101,75	102,77	103,80	104,63	105,46	105,80	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan ditampilkan pada tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD

NO .	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	0	50	52	54	56	58	60	Distribusi
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,8	94,1	94,4	94,7	95,0	95,3	95,6	Konsumsi
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0,8	1	1	1	1	1	1	Keterseediaan

NO .	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	Konsumsi
5	Jumlah Produksi Daging	Ton	167.514	175.890	184.684	193.918	203.614	213.795	224.485	Peternakan
6	Jumlah Produksi Telur	Ton	248.538	260.965	274.013	287.714	302.099	317.204	333.064	Peternakan
7	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Menular Strategis (PHMS)	%	100	100	100	100	100	100	100	Keswan Kesmavet
8	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	100	100	100	100	100	100	100	Keswan Kesmavet
8	Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Ketersediaan
9	Jumlah Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hari, Protein gram per Kap/Hari	kcal/kap/hari	2,105/59,82	2400/63	2400/63	2400/63	2400/63	2400/63	2400/63	Ketersediaan

NO .	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab/Kota	0	0	0	8	8	8	8	Keterse diaan
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	Sekre tariat
12	Persentase Pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Sekre tariat

table 4.6 Prognosis Pendapatan Pelayanan BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan

Uraian	Progrnosis Pendapatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Hewan							
	2026		2027		2028		2029	
	Jumlah Layanan	Estimasi Pendapatan	Jumlah Layanan	Estimasi Pendapatan	Jumlah Layanan	Estimasi Pendapatan	Jumlah Layanan	Estimasi Pendapatan
Pelayana n Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan	4.309	686.100.000	6.925	1.137.200.000	8.329	1.461.000.000	8.653	1.505.400.000

Tabel 4.7 Pendanaan Indikatif 5 Tahun Kedepan BLUD UPTD Laboratorium keswan dan kesmavet

Jenis Pelayanan Dasar	Idikator Program Kegiatan	Tahun							
		2026		2027		2028		2029	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp
Pengujian Laboratorium	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	27312	557.000.000	50882	1.094.000.000	5693	1.196.300.000	63342	1.310.200.000

BAB V

P E N U T U P

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai dan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan yang tinggi dalam memprioritaskan program/ kegiatan/ subkegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Renstra mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor : 900.1.15.5-3406 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan hal-hal seperti :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan periode sebelumnya melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan dengan Tahun 2020;

- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2020 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu – isu strategis Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja yang terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJMN 2025–2029) maupun daerah (RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025–2030) meliputi:

1. Gender dan Inklusi Sosial

Program/kegiatan dalam Renstra sudah disusun dengan mempertimbangkan gender dan inklusi sosial dengan memperhatikan kebutuhan dan pespektif berbagai kelompok Masyarakat dan juga di internal dinas seperti tergambar dalam kegiatan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kegiatan lainnya. Diinternal dinas juga tidak ada pembatasan atau diskriminasi gender untuk menduduki suatu jabatan dan jenjang karir.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Aspek lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang sebagai dasar Pembangunan berkelanjutan jadi dasar penyusunan Renstra, dapat dilihat dari Program/Kegiatan Pengadaan bibit ternak dari provinsi lain, pelestarian plasma nutfah Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagan, penyebaran bibit hijauan pakan ternak.

3. Transformasi Digital

Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan inovasi secara bertahap baik diinternal dinas dan juga dalam kegiatan sudah jadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra ini.

4. Pembangunan Rendah karbon

Didalam Renstra yang terlihat di beberapa Program/Kegiatan/Subkegiatan sangat memperhatikan Pembangunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Tergambar dari kegiatan pemberian bantuan benih

tanaman/sayuran, sertifikasi tanaman sayuran dan buah, pemberian Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Surveilensi Penyakit Hewan.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan lingkungan menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Ada beberapa Program/Kegiatan yang mendukung seperti pengadaan Cadangan pangan pemerintah.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan di Sumatera Selatan, semoga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan pelaku usaha Ketahanan Pangan dan Peternakan pada khususnya.